

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kewajibannya adalah memberikan pertanggungjawaban kepada publik, dengan menyediakan informasi mengenai kinerja pemerintah daerah kepada para pemangku kepentingannya (*stakeholder*). Pelaporan keuangan sektor publik khususnya laporan keuangan pemerintah daerah adalah wujud dan realisasi pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang transparan untuk mencapai *good governance*. Informasi dalam laporan keuangan sangat diperlukan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan berbagi pihak, sehingga bermanfaat atau dengan kata lain, informasi tersebut harus mempunyai nilai (Suwardjono 2005). Informasi akan bermanfaat apabila memenuhi *qualitative characteristics*, berupa ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (SAP 2010).

Fenomena laporan keuangan pemerintah daerah merupakan hal yang menarik untuk dikaji. Hasil audit BPK secara umum menunjukkan sudah tertib dalam pelaporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah kabupaten kudus, terlihat antara lain atas akuntabilitas laporan keuangan yang telah dilakukan setiap tahun. Dan telah dilakukan sistem pengawasan dan keseimbangan dari laporan yang ada dengan lima indikator asersi laporan keuangan pertama yaitu

keterjadian dan keberadaan buku dengan transaksi yang ada hingga wujud fisik. Serta ada penilaian, hak, kewajiban, kelengkapan dan pengungkapan. Namun hal ini lebih menekankan pada pengawasan internal, sehingga pengelolaan keuangan akan semakin baik. Hasil opini BPK dikabupaten Kudus menunjukkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang terjadi selama enam tahun. Kondisi ini menunjukkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sudah baik walaupun masih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan yang disusun pemerintah Kabupaten Kudus memiliki kelebihan-kelebihan atas laporan keuangan yang disusun, diantaranya : (1) Menunjukkan nilai perubahan kas dan distribusi perusahaan secara detail, serta menunjukkan nilai kenaikan atau penurunan kas secara detail; (2) sudah ada pengungkapan evaluasi segala aktivitas yang sedang dijalankan pemerintah daerah; (3) nilai persediaan pada neraca 2017 sudah menggambarkan nilai persediaan yang sebenarnya.

Hasil audit BPK secara umum menunjukkan belum tertibnya pelaporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah, terlihat antara lain dari kelemahan pengendalian intern, ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan, penyusunan yang belum selesai dengan SAP dan belum tertibnya pengelolaan aset/barang milik daerah. Hasil opini BPK pada semester I Tahun 2014 terhadap 456 LKPD dari 524 Pemda provinsi/kabupaten/ kota seluruh indonesia, menunjukkan data:opini WTP sebesar 33,55%; WDP sebesar 60,52%; TW sebesar 1,97% dan TMP sebesar 3,94%. Kondisi ini masih cukup memprihatinkan karena opini WDP masih menduduki peringkat yang tinggi, apabila dibandingkan

dengan opini WTP. Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan yang disusun pemerintah Kabupaten Sragen TA 2013, masih memberikan opini WDP seperti tahun-tahun sebelumnya. Terdapat kelemahan-kelemahan atas laporan keuangan yang disusun, diantaranya: (1) Reklasifikasi ketekoran kas di kas daerah Rp. 604.600.000,00 ke aset lainnya, belum menjelaskan pihak yang dikenakan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; (2) Pembukuan rekening kas daerah dan pengelolaan kas di SKPD belum memadai; (3) Nilai persediaan pada neraca per 31 Desember 2013 belum menggambarkan nilai persediaan yang sebenarnya; (4) Pengendalian atas pencatatan aset tetap kurang memadai (Rahmawati, 2015).

Pemerintah daerah adalah suatu entitas pelaporan keuangan publik yang harus mempertanggung jawabkan tata kelola keuangan daerah pada *stakeholder* (pemangku kepentingan) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Tuntutan yang semakin besar terhadap akuntabilitas publik ini digunakan untuk memberikan informasi tentang keuangan dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dibutuhkan suatu entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan (Sujarweni, 2015:88).

Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan landasan utama diberlakukannya otonom daerah di Indonesia. Dengan adanya otonom ini, daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri

berdasarkan hak dan kewenangan dalam menggunakan dan mengelola sumber-sumber keuangan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan berdasarkan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Laporan keuangan merupakan posisi keuangan penting yang berasal dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik dan merupakan media sebuah entitas untuk mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada publik selain itu juga berfungsi untuk memberikan informasi data pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja pemerintahan, maka dari itu informasi yang disajikan harus memiliki nilai, agar informasi keuangan tersebut dapat bermanfaat bagi penggunaannya menandakan laporan keuangan tersebut berkualitas, dalam hal ini laporan keuangan haruslah memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), yang merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Menurut UU 71 tahun 2010 tentang SAP dijelaskan bahwa laporan yang disajikan itu berkualitas apabila memenuhi karakteristik kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dipahami.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan, bahwa untuk tujuan akuntabilitas atas pengelolaan dana-dana yang dikelola oleh provinsi atau kabupaten/kota diwajibkan menyiapkan laporan keuangan pemerintah daerah. Salah satu indikator utama yang menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggarannya adalah dengan terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas. Salah satu faktor pendukung kualitas laporan keuangan yang baik adalah sistem

informasi akuntansi, dimana laporan keuangan dihasilkan dari suatu proses yang didasarkan pada input, proses dan output yang baik. Ketiga aspek tersebut haruslah terpadu dan berkesinambungan sebagai pondasi dari sistem pelaporan keuangan yang baik (Kurniawan, 2011). Pemerintah Kabupaten/Kota maupun provinsi diwajibkan menerbitkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban telah berakhirnya tahun anggaran dan wajib diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Teknologi informasi berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan keuangan sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif (Yuli:2016). Teknologi informasi termasuk komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), database, jaringan (*internet, interanet*) dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi informasi (Wilkinson dkk, 2000). Menurut Widjajanto (2001) Sistem informasi dapat dikatakan efektif apabila sistem mampu menghasilkan informasi yang dapat diterima dan mampu memenuhi harapan informasi secara tepat waktu (*timely*), akurat(*accurate*), dan dapat dipercaya (*reliable*).

Pengendalian internal akuntansi yang merupakan bagian dari sistem pengendalian internal, meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan serta mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi (Bastian, 2007:450).

Kapasitas sumber daya manusia juga merupakan faktor untuk mencapai laporan keuangan yang berkualitas. Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Emilda, 2014).

Komitmen organisasi adalah suatu unit terkoordinasi yang terdiri dari dua orang atau lebih dan berfungsi mencapai suatu sasaran atau tujuan tertentu. Komitmen organisasi merupakan nilai personal, yang kadang-kadang mengacu pada sikap loyal pada perusahaan/organisasi atau komitmen pada perusahaan itu (Hapsari, 2011). Komitmen organisasi adalah kuatnya pengenalan dan keterlibatan seseorang dalam suatu organisasi tertentu (Darmawan, 2013:168).

Berdasarkan fenomena yang ada dan penelitian-penelitian terdahulu, menyebabkan peneliti tertarik untuk menguji kembali kualitas laporan keuangan. Perbedaan penelitian ini adalah menambahkan dua variabel independen disarankan agar peneliti selanjutnya dapat ditemukan variabel baru yang akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu penambahan pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal akuntansi. Perbedaan kedua, objek penelitian Manimpurung, dkk (2018) dilakukan pada BPKAD di Kota Manado, sedangkan objek penelitian ini dilakukan pada OPD di Kabupaten Kudus. Perbedaan ketiga yaitu variabel yaitu waktu penelitian ini melakukan penelitian pada tahun 2019 dan peneliti Manimpurung, dkk(2018) dilaksanakan pada tahun 2018.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas perlu dilakukan penelitian kembali dengan judul “ PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PENGENDALIAN INTERNAL AKUNTANSI, KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi empiris pada OPD di kabupaten Kudus)”.

1.2 Ruang Lingkup

Untuk mencegah terjadinya kesalahan saat melakukan pembahasan maka peneliti membatasi permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini menggunakan dua Variabel yaitu Independen yang terdiri dari pemanfaatan teknologi informasi (X1), pengendalian internal akuntansi (X2), kapasitas sumber daya manusia (X3) dan komitmen organisasi (X4). Kualitas laporan keuangan sebagai Variabel Dependen.
2. Objek penelitian ini adalah seluruh OPD di Kabupaten Kudus.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu bentuk pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada *stakeholder* yang didalamnya mencakup berbagai macam pekerjaan yang membutuhkan keuangan. Hasil opini BPK di Kabupaten Kudus menunjukkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang terjadi selama enam tahun. laporan keuangan yang disajikan harus berkualitas dimana penyaji harus memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan dan dipahami agar terhindar dari kecurangan dan

kesalahan. Peneliti akan melakukan penelitian untuk memberikan bukti empiris bahwa pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal akuntansi, kapasitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di OPD Kabupaten Kudus.

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada dalam penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah variabel independen pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal akuntansi, kapasitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4.2 Manfaat Penelitian

A. Bagi Praktisi

Penelitian ini dapat memberikan wawasan pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal akuntansi, kapasitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.

B. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan agar mengembangkan ilmu pengetahuan akuntansi dan akuntansi pemerintah daerah.

1.4.2.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap penelitian akuntansi pemerintahan yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal akuntansi, kapasitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kudus.

1.4.2.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis sebagai berikut :

Bagi penulis merupakan aplikasi teori yang selama ini diperoleh dalam perkuliahan dan agar dapat mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal akuntansi, kapasitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kudus.

